

### KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA

## NOMOR M.HH-85.KP.03.03 TAHUN 2024 TENTANG

# PEMBERHENTIAN DARI JABATAN MANAJERIAL DAN NONMANAJERIAL SERTA PENGANGKATAN DALAM JABATAN MANAJERIAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM.

### MENTERI HUKUM.

#### Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Percepatan Pengisian Jabatan Aparatur Sipil Negara Pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian dan Lembaga, perlu melakukan percepatan pengisian jabatan manajerial di lingkungan Kementerian Hukum;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, pertu menetapkan Keputusan Menteri Hukum tentang Pemberhentian dari Jabatan Manajerial dan Nonmanajerial Serta Pengangkatan dalam Jabatan Manajerial di Lingkungan Kementerian Hukum;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6994);
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6897);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  - Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2648);
  - Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
  - Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);
  - Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);

- Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
- Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
- 10. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM TENTANG PEMBERHENTIAN DARI

JABATAN MANAJERIAL DAN NONMANAJERIAL SERTA PENGANGKATAN DALAM JABATAN MANAJERIAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM.

KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, diberhentikan dari

jabatan lamanya sebagaimana tersebut dalam lajur 4, diangkat dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 5, dan diberikan tunjangan jabatan struktural sebagaimana tersebut dalam lajur 6 Daftar Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Biaya perjalanan ke tempat tugas yang baru ditanggung oleh Negara sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal pelantikan.

KEEMPAT : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui

dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

MENDER HUKUM

SUPRATIMAN ANDI AGTAS

#### Tembusan:

- 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan;
- Menteri Hak Asasi Manusia;
- 5. Pit. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- 6. Wakil Menteri Hukum;
- Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan;
- 8. Wakil Menteri Hak Asasi Manusia:
- 9. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum:
- Inspektur Jenderal Kementerian Hukum;
- 11. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Unit Utama;
- 12. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan Pegawai yang bersangkutan.

# DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM

NOMOR

: M.HH-85.KP.03.03 TAHUN 2024

TANGGAL

: 4 Desember 2024

NO	NAMA/ NIP	PANGKAT	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	HADIYANTO, S.H., M.H. 197208151994031001	PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)	KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA GORONTALO	KEPALA PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN PELAYANAN HUKUM PADA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN KEMENTERIAN HUKUM	Tunjangan Jabatan Struktural Eselon II.a Sebesar Rp. 3.250.000,00
2.	Dr. RACHMAYANTHY, Bc.IP., S.H., M.Si. 196904261992032001	PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)	LEKTOR KEPALA PADA POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA		S.D.A.
3.	Dr. Drs. MEURAH BUDIMAN, S.H., M.H. 196803041991031001	PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)	KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ACEH	KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM ACEH	S.D.A.
4.	IGNATIUS MANGANTAR TUA SILALAHI, S.H., M.H 196812301996031001	PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)	DIREKTUR HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI PADA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL	KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA UTARA	S.D.A.
5.	Dr. ALPIUS SARUMAHA, SH, M.H 196702112005021001	PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)	DIREKTUR PENGUNDANGAN, PENERJEMAHAN, PUBLIKASI, DAN SISTEM INFORMASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT	S.D.A.
6.	AGATO P P SIMAMORA, S.H.,M.H 197004251998031001	PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)	KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA SELATAN	KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA SELATAN	S.D.A.
7.	SANTUN MASPARI SIREGAR, S.H., M.H 196705081991031001	PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)	DIREKTUR BADAN USAHA PADA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU	S.D.A.
8.	NUR ICHWAN, S.H, M.H. 196506111985031001	PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)		KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM RIAU	S.D.A.

NO	NAMA/ NIP	PANGKAT	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	Keterangan
1	2	3	4	5	6
9.	EDISON MANIK, S.H., M.Si 197802172001121002	PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)	KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RIAU	KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN	S.D.A.
10.	Drs. HARUN SULIANTO, Bc.IP, S.H, M.H. 196504081987031002	PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)	KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BANGKA BELITUNG		S.D.A.
11.	1DRIS, SH.,M.H. 197312101998051001	PEMBINA TINGKAT I (IV/b)	KEPALA DIVISI ADMINISTRASI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN TIMUR	KEPALA KANTOR WILAYAH	S.D.A.
12.	SANTOSA, S.H., M.M 196507021987031007	PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)	KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BENGKULU		S.D.A.
13.	Dr. R. NATANEGARA KARTIKA PURNAMA, S.E., M.Si 197309081999031001	PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)	SEKRETARIS BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA		S.D.A.
14.	ROMI YUDIANTO, S.H., M.H. 197706261997031001	PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)	KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BANTEN		S.D.A.
5.	ASEP SUTANDAR, A.Md.IP., S.Sos., M.Si 196704161988031001	PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)	KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT JENDERAL	KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA BARAT	S.D.A.
6.	HENI SUSILA WARDOYO, S.H., M.H. 196902141988031001	PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)	SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH	S.D.A.
7.	AGUNG REKTONO SETO, S.E., M.Si 197012021999031001	PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)	KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA D.I. YOGYAKARTA	KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I. YOGYAKARTA	S.D.A.
18.	HARIS SUKAMTO, A.K.S., S.H., M.H. 196606051989111001	PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)	DIREKTUR PIDANA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR	S.D.A.

NO	NAMA/ NIP	PANGKAT	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	Keterangan
1	2	3	4	5	6
19.	WAHYU EKA PUTRA, SH, MM 198105222000121002	PEMBINA TINGKAT f (IV/b)	KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DKI JAKARTA	KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BALI	S.D.A.
90.	I GUSTI PUTU MILAWATI, S.S., S.H., M.H. 197705092001122001	PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)	SEKRETARIS BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA BARAT	\$.D.A.
.1.	SILVESTER SILI LABA, S.H. 196701061993031001	PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)	KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NUSA TENGGARA TIMUR		S.D.A.
22.	JONNY PESTA SIMAMORA, S.IP., M.Si. 197312251993031001	PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)	KEPALA PUSAT JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN	S.D.A.
23.	NURYANTI WIDYASTUTI, S.H. M.M. Sp.N 196510271991032001	PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)	DIREKTUR FASILITASI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PEMBINAAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN SELATAN	S.D.A,
24.	MAJU AMINTAS SIBURIAN, A.Md.IP., S.Pd., M.H. 197001051995031001	PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)	KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN TENGAH	KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN TENGAH	S.D.A.
25.	Dr. M. IKMAL IDRUS, S.H., M.H. 196903182003121002	PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)	KEPALA DIVISI ADMINISTRASI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA LAMPUNG	KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN TIMUR	S.D.A.
26.	SUNU TEDY MARANTO, ST, S.H, M.H. 197807232003121001	PEMBINA TINGKAT I (IV/b)	KEPALA DIVISI ADMINISTRASI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI TENGGARA	KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI BARAT	S.D.A.
27.	ANDI BASMAL, S.Sos., S.H., M.H. 197202151992031002	PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)	KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN TIMUR	KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI	S.D.A.

NQ	NAMA/ NIP	PANGKAT	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	Keterangan
1	2	3	4	5	6
28.	RAKHMAT RENALDY, A.Md.IP., S.H., M.H 197310101996031001	PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)	KEPALA DIVISI ADMINISTRASI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NUSA TENGGARA TIMUR	KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI	S.D.A.
29.	TOPAN SOPUAN, S.Sos., SH., M.H. 197412252003121001	PEMBINA TINGKAT I (IV/b)	DIREKTUR TEKNOLOGI INFORMASI PADA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGGARA	S.D.A.
30.	KURNIAMAN TELAUMBANUA, SH, M.Hum. 197501132001121001	PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)	DIREKTUR MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL		S.D.A,
31.	Dr. PAGAR BUTAR BUTAR, S.H., M.Si. 197208241994031001	PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)	KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA GORONTALO		S.D.A.
32.	Dr., SAIFUL SAHRI, A.Md.IP., S.Sos., M.H. 197608171997031001	PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)	KEPALA LAPAS KELAS I BANDAR LAMPUNG	KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU	S.D.A.
33.	BUDI ARGAP SITUNGKIR, A.Md.IP., S.H., M.H. 197510211998031001	PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)	KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RIAU		S.D.A.
34.	ANTHONIUS MATHIUS AYORBABA, S.H. M.Si 197105151996101001	PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)	KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PAPUA	KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA	S.D.A.
35.	Drs. PIET BUKORSYOM, S.H., M.H. 196512271996101001	PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)	KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PAPUA BARAT	KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT	S.D.A.
36.	PURWANDANI HARUM PINILIHAN, S.H., M.H. 197906161998031005	PEMBINA (IV/a)	KEPALA BAGIAN UMUM PADA BADAN	KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM ACEH	Tunjangan Jabatan Stuktural Eselon II.b Sebesar Rp. 2.025.000,00
37.	MUHAMMAD ARDININGRAT HIDAYAT, A.Md.Im., S.H., MPA 198203052001121002	PEMBINA (IV/a)		KEPALA DIVISI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM ACEH	S.D.A.

NO	NAMA/ NIP	PANGKAT	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	Keterangan
1	2	3	4	5	6
38.	SAHATA MARLEN SITUNGKIR, M.Si 197106221992031002	PEMBINA TINGKAT I (IV/b)	KEPALA DIVISI ADMINISTRASI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA UTARA	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN	S.D.A.
39.	FERRY FERDIANSYAH, S.H., M.H. 198002172001121001	PEMBINA (IV/a)	KEPALA BAGIAN UMUM KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA BARAT	KEPALA DIVISI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA UTARA	S.D.A.
10.	LISTA WIDYASTUTI, S.H., M.H. 197310092000032001	PEMBINA TINGKAT I (IV/b)	KEPALA BIDANG HAK ASASI MANUSIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TENGAH	KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT	S.D.A.
11.	Dr. HENDRA KURNIA PUTRA, S.H., M.H. 198706172010121001	PEMBINA (IV/a)	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA PADA DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PERUNDANG - UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM PADA KANTOR	S.D.A.
12.	ALKANA YUDHA, S.H., M.M. 197703262003121002	PEMBINA TINGKAT ! (IV/b)	ARSIPARIS MADYA PADA SEKRETARIAT JENDERAL	KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA SELATAN	S.D.A.
13.	HENDRIK PAGILING, SH, MH 198305022001121002	PEMBINA TINGKAT I (IV/b)	KEPALA DIVISI ADMINISTRASI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PAPUA	KEPALA DIVISI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA SELATAN	S.D.A.
<b>1</b> 4.	MACHYUDHIE, S.T., M.M.S.1 197609172003121001	PEMBINA (IV/a)	KEPALA DIVISI ADMINISTRASI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BENGKULU		S.D.A.
45.	ERNIE NURHEYANTI MICELENI TOELLE, S.H., M.H. 196811141995102001	PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)	KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BENGKULU		S.D.A.

NO	NAMA/ NIP	PANGKAT	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	Keterangan
1	2	3	4	5	6
48.	JOHAN MANURUNG.,S.H.,M.H 196610251986031001	PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)	KEPALA DIVISI ADMINISTRASI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RIAU		S.D.A.
17.	DINA RASMALITA, S.H, M.H. 197511102001122001	PEMBINA TINGKAT I (IV/b)	KEPALA BAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	PERUNDANG - UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM PADA KANTOR	S.D.A.
8.	HOT MULIAN SILITONGA, S.H M.H. 19750415200212002	PEMBINA TINGKAT I (IV/B)	KEPALA BIDANG PELAYANAN HUKUM KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEPULAUAN RIAU	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN	S.D.A.
19.	ZULHAIRI, S.H., M.H. 197112192003121001	PEMBINA TINGKAT	KEPALA DIVIS! PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BANTEN		S.D.A.
iO.	KASWO, S.Sos., M.A.P. 197404261999031001	PEMBINA TINGKAT I (IV/b)	KEPALA DIVISI ADMINISTRASI KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU	KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANGKA BELITUNG	S.D.A.
51.	Dr. RAHMAT FERI PONTOH, S.H.,M.H 198302202006041001	PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA GORONTALO	PERUNDANG - UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM PADA KANTOR	S.D.A.
52.	KORTINI JM SIHOTANG, S.Sos., M,Si. 197501161999032001	PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)	KEPALA DIVISI ADMINISTRASI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAMBI	KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAMBI	S.D.A.
53.	ALEX COSMAS PINEM, S.H., M.Si 196807011993031001	PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)	KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA UTARA	PEMBINAAN HUKUM PADA KANTOR	S.D.A.

NO	NAMA/ NIP	PANGKAT	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	Keterangan
1	2	3	4	5	6
54.	BENNY DARYONO, S.H., M.E. 197710151998031001	PEMBINA (IV/a)	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR MADYA PADA SEKRETARIAT JENDERAL	KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM LAMPUNG	S.D.A.
55.	Dr. LAILA YUNARA, S.H., M.H. 197301311999032007	PEMBINA TINGKAT I (IV/b)	ANALIS HUKUM MADYA PADA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	KEPALA DIVISI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM LAMPUNG	S.D.A.
56.	PICESCO ANDIKA TULUS, S.H., M.M. 198503102005011001	PEMBINA (IV/a)	KEPALA BAGIAN PENGEMBANGAN KARIR SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIAT JENDERAL	KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN	S.D.A.
57.	MARSINTA SAURMA TRIATY SIMANJUNTAK, S.E., M.M. 197805302001122001	PEMBINA TINGKAT I (IV/b)	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT MADYA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	KEPALA DIVISI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN	S.D.A.
8.	ANDI YULIA HERTATY, S.H., M.Kn. 197712042008012001	PEMBINA (IV/a)	ANALIS HUKUM MADYA PADA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA	S.D.A.
59.	TESSA HARUMDILA, A.Md.lm., S.H., M.Si. 198511132005011001	PEMBINA (IV/a)	KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN PENGAMANAN BIRO UMUM SEKRETARIAT JENDERAL	KEPALA DIVISI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA	S.D.A.
30.	HEMAWATI BR PANDIA, A.Md., S.H., M.M. 197502272001122001	PEMBINA (IV/a)	KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAMBI	KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA BARAT	S.D.A.
31.	FUNNA MAULIA MASSAILE, ST., M.Si 197603122005012001	PEMBINA TINGKAT I (IV/b)	PERENCANA MADYA PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	KEPALA DIVISI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA BARAT	S.D.A.

NO	NAMA/ NIP	PANGKAT	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	Keterangan
1	2	3	4	5	6
32.	TJASDIRIN, S.H., M.H. 196701171994031001	PEMBINA TINGKAT I (IV/b)	ANALIS HUKUM MADYA PADA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH	S.D.A.
33.	SASMITA., S.H.,M.H. 196505261989031001	PEMBINA UTAMA MUDA (iV/c)	KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEPULAUAN RIAU		S.D.A.
54.	EEM NURMANAH, S.Sos., M.Si. 196906071992032001	PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)	ANALIS SDM APARATUR MADYA PADA INSPEKTORAT JENDERAL	KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I. YOGYAKARTA	S.D.A.
55.	SOLEH JOKO SUTOPO, A.Md.IP., SH., MH. 198207092002121001	PEMBINA (IV/a)	KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA YÖGYAKARTA	KEPALA DIVISI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I. YOGYAKARTA	S.D.A.
6.	RADEN FADJAR WIDJANARKO, S.E., M.M. 197003191997031006	PEMBINA TINGKAT I (IV/b)	PELAKSANA PADA DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	KEPALA DIVISI PËLAYANAN HUKUM KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR	S.D.A.
37.	TITIK SETIAWATI, SH, M.H. 197102181994032001	PEMBINA TINGKAT I (IV/b)	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN MADYA PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	KEPALA DIVISI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN DAN	S.D.A.
88.	Drs. I WAYAN REDANA, M.H. 196711201993031001	PEMBINA TINGKAT I (IV/b)	KEPALA BIDANG PELAYANAN HUKUM KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BALI	KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BALI	S.D.A.
39.	ANGGIAT FERDINAN, S.H., M.H. 198502231989031002	PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)	KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TENGAH	KEPALA DIVISI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BALI	S.D.A.

NO	NAMA/ NIP	PANGKAT	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	Keterangan
1	2	3	4	5	6
70.	FARIDA, S.Pt., S.A.P., M.Si. 197001122003122001	PEMBINA TINGKAT   (IV/b)	KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NUSA TENGGARA BARAT	KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA BARAT	S.D.A.
71.	EDWARD JAMES SINAGA, S.Si., M.H. 197202242006041001	PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)	KEPALA DIVISI ADMINISTRASI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PAPUA BARAT		S.D.A.
72.	BAWONO IKA SUTOMO, A.Md.IP., S.H., M.Si. 197601011998031001	PEMBINA TINGKAT I (IV/b)	KEPALA BIDANG PELAYANAN TAHANAN, KESEHATAN, REHABILITASI, PENGELOLAAN BENDA SITAAN, BARANG RAMPASAN NEGARA, DAN KEAMANAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA GORONTALO	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN	S.D.A.
73.	JONSON SIAGIAN, S.H., M.H. 196707101997031001	PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)	KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NUSA TENGGARA TIMUR	KEPALA DIVISI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA TIMUR	S.D.A.
74.	HAJRIANOR, S.H.,M.H. 196612141990031003	PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)	KEPALA DIVISI ADMINISTRASI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN BARAT		S.D.A.
75.	ZULIANSYAH, SH, M.Si 197207012001121002	PEMBINA TINGKAT I (IV/b)	KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI TENGAH	PERUNDANG - UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM PADA KANTOR	S.D.A.

NO	NAMA/ NIP	PANGKAT	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	Keterangan
1	2	3	4	5	6
76.	MEIDY FIRMANSYAH, S.Sos 198005032005011001	PEMBINA TINGKAT I (IV/b)	KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA D.I. YOGYAKARTA	KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN SELATAN	S.D.A.
77.	ANTON EDWARD WARDHANA, S.Kom., M.Si. 197407041999031001	PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)	KEPALA DIVISI ADMINISTRASI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TENGAH	KEPALA DIVISI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN SELATAN	S.D.A.
78.	JOKO MARTANTO, SE., M.Si. 197203051999031007	PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)	KEPALA DIVISI ADMINISTRASI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN TENGAH	· ·	S.D.A.
79.	MUHAMAD MUFID, S.Ag, M.Si, M.H. 197603042005011001	PEMBINA TINGKAT I (iV/b)	KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN TENGAH	KEPALA DIVISI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN TENGAH	\$.D.A.
30.	HANTON HAZALI, SH, M.H. 197211211993031001	PEMBINA TINGKAT I (IV/b)	KEPALA BAGIAN UMUM KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN TIMUR		S.D.A.
31.	Dr. FERRY GUNAWAN CHRISTY, S.H.,M.H. 198611022010121001	PEMBINA (IV/a)	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MADYA PADA DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KEPALA DIVISI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN TIMUR	S.D.A.
82.	Dr. HIÐAYAT, S.H., S.IP, M.Si. 197805062003121002	PEMBINA TINGKAT I (IV/b)	KEPAŁA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI BARAT		S.D.A.

NO	NAMA/ NIP	PANGKAT	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	Keterangan
1	2	3	4	5	6
33.	JOHN BATARA MANIKALLO, S.E.,S.H.,M.H. 197605062006041001	PEMBINA TINGKAT I (IV/b)	KEPALA DIVISI ADMINISTRASI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI UTARA		S.D.A.
34.	DEMSON MARIHOT, SE 198011262009121002	PEMBINA (IV/a)	KEPALA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL		S.D.A.
35.	HENY WIDYAWATI, SH., M.H. 197601312001122001	PEMBINA TINGKAT I (IV/b)	KEPALA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	KEPALA DIVISI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN	S.D.A.
36.	NUR `AINUN, A.Md.I.P., S.Sos., M.Si. 197611071998032001	PEMBINA TINGKAT I (IV/b)	PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN MADYA PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH	S.D.A.
37.	SOPIAN, A.Md.IP .,S.H., M.H. 197307211997031001	PEMBINA TINGKAT I (IV/b)	KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA SUNGGUMINASA	KEPALA DIVISI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH	S.D.A.
38.	TUBAGUS ERIF FATURAHMAN, S IP, M.Si 197412222001121001	PEMBINA TINGKAT I (IV/b)	KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI TENGGARA	KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGGARA	S.D.A.
<b>19</b> .	CANDRA FRIANDI ACHMAD, S.H., M.H 198104122002121001	PEMBINA TINGKAT I (IV/b)	KEPALA DIVISI ADMINISTRASI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN SELATAN	PERUNDANG - UNDANGAN DAN	S.D.A.

NO	NAMA/ NIP	PANGKAT	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	Keterangan
1	2	3	4	5	6
90.	RAYMOND JOHANIS HENDRAPUTRA TAKASENSERAN, S.H., M.H 196801161992031001	PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)	KEPALA DIVISI ADMINISTRASI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI TENGAH	KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI UTARA	S.D.A.
11,	VEIBY SINTA KOLOAY, S.H., M.H 197502192001122001	PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)	KEPALA DIVISI ADMINISTRASI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA GORONTALO	KEPALA DIVISI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI UTARA	S.D.A.
2.	ARIF RAHMAN, Bc.IP., S.H., M.H. 196910051993031001	PEMBINA TINGKAT	KEPALA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I KUTOARJO	KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM GORONTALO	S.D.A.
3.	RAMLAN HARUN, S.H., M.H 198007172002121001	PEMBINA TINGKAT 1 (IV/b)	KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN SELATAN		S.D.A.
4.	REZA ADITIYAS ANANDA, SH 198504112006041001	PEMBINA (IV/a)	KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA MALUKU	KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM	S.D.A.
5.	LA MARGONO, S.H., M.H. 197201161993031001	PEMBINA TINGKAT I (IV/b)	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA MALUKU		S.D.A.
6.	CHUSNI THAMRIN, S.Sos., M.Si. 197303141992031001	PEMBINA (IV/a)	PRANATA KOMPUTER MADYA PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN	S.D.A.

NO	NAMA/ NIP	PANGKAT	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	Keterangan
1	2	3	4	5	6
97.	HILDA MULYADIN, S.H.,M.H. 197904122006041001	PEMBINA (IV/a)	KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI UTARA	KEPALA DIVISI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU UTARA	S.D.A.
98.	SLAMET IMAN SANTOSO, SE., M.M. 197505202001121002	PEMBINA TINGKAT 1 (IV/b)	PRANATA KOMPUTER MADYA PADA INSPEKTORAT JENDERAL	KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA	S.D.A.
99.	MAX WAMBRAUW, S.H., M.H. 197109151997121001	PEMBINA UTAMA MUDA (fV/c)	KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PAPUA	PERUNDANG - UNDANGAN DAN	S.D.A.
100.	ADELCHANDRA, S.Kom., M.M. 197708082002121001	PEMBINA TINGKAT I (IV/b)	ANALIS KEBIJAKAN MADYA PADA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL	KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT	S.D.A.
101.	MUHAYAN,S.H., M.H. 1972007191999030000	PEMBINA TINGKAT I (IV/b)	KEPALA BIDANG PELAYANAN HUKUM KANTOR WILAYAH HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DKI JAKARTA	KEPALA DIVISI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT	S.D.A.

UBLIK ISUBRATMAN ANDI AGTAS